

**MENATA KEMBALI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA,
MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA**

Kuliah Umum
Nurcholish Madjid
Rektor



UNIVERSITAS
PARAMADINAMULTYA
Jakarta

**MENATA KEMBALI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA,
MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA**

(Kuliah umum dalam kesempatan
penandatanganan kesepakatan kerjasama
antara Universitas Paramadina Mulya
dan PT Mekar Prana Indah/Bina Sentra.
Jakarta, Jumat, 17 Safar. 1419 / 12 Juni. 1998)

Nurcholish Madjid
Rektor



**UNIVERSITAS
PARAMADINA MULYA**
Jakarta

بسم الله الرحمن الرحيم
روبه نستعين على أمور الدنيا والدين

**MENATA KEMBALI KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA,
MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA**

Kuliah umum dalam kesempatan
penandatanganan kesepakatan kerjasama
antara Universitas ParamadinaMulya
dan PT Mekar Prana Indah/Bina Sentra,
Jakarta, Jum'at, 17 Safar, 1419 / 12 Juni, 1998

**Nurcholish Majid
Rektor**

Segala puji bagi Allah. Semu sekalian alam,
Salawat dan salam untuk Muhammad Rasul Allah, dan untuk para
keluarga serta sahabatnya sekalian.

Siang ini adalah saat yang amat penting dan membahagiakan
bagi kami para perintis dan pendukung gagasan didirikannya
Universitas ParamadinaMulya. Sebuah gagasan tentang lembaga
pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah yang telah dikembangkan
sejak beberapa tahun silam, tapi yang terhambat pewujudan dan
pelaksanaannya oleh tiadanya kesiapan dalam prasarana fisik dan
karena terpaan berbagai krisis yang melanda bangsa dan negara kita.

Namun syukur kepada Tuhan bahwa kini jalan mulai nampak
terang. Kerjasama dengan PT Mekar Prana Indah/Bina Sentra yang
sudah lama direncanakan, hari ini dapat dengan resmi diwujudkan.
Penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,
khususnya pihak pimpinan PT Mekar Prana Indah/Bina Sentra, atas
segala iktikad baik, uluran tangan dan pengertian mendalam yang

ditulurkan kepada Universitas Paramadina Mulya, sehingga kerjasama ini dimungkinkan. Dengan tulus kita panjatkan do'a, semoga Allah s.w.t. melimpahkan perkenan dan barakah-Nya kepada kita semua. Amin.

Gagasan mendirikan sebuah universitas bukanlah hal yang amat istimewa di negeri kita. Di sekitar kita dalam lingkungan ibu kota ini, dan di bagian-bagian lain negara kita, banyak kita saksikan berdirinya universitas dengan berbagai corak ragan dan statusnya. Semuanya mencoba memberi jasa kepada bangsa dan negara. Khususnya di bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebuah negeri dengan wilayah yang sedemikian luas, dan sebuah masyarakat dengan jumlah warga yang sedemikian banyak, tentu memerlukan perhatian dan kerja ekstra untuk membangun dan mengembangkannya. Semuanya itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sebanding dengan kedudukan negara kita, Republik Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di muka bumi.

Maka tambahan satu universitas kepada sekian jumlah yang sudah ada, bahkan tambahan berpuluh-puluh universitas, kiranya bukanlah hal yang luar biasa. Perkembangan negara dan masyarakat kita menuntut pembangunan sumber daya manusia yang jauh lebih luas jangkauan wawasannya dan lebih tinggi tingkat kecakapannya daripada yang sampai saat ini telah terwujud. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah investasi kemanusiaan (*human investment*) yang dipandang sebagai tugas utama universitas. Perkembangan sejarah dunia modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidaklah terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terpendam dalam bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini, bahkan di angkasa luar sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu.

Dengan perkataan lain, kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh segi-segi kuantitatif bangsa itu, baik berkenaan dengan kekayaan alam maupun jumlah warganya. Kejayaan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya bangsa itu. Dari sudut pandang inilah dapat

dimengerti, mengapa bangsa kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain, termasuk oleh bangsa-bangsa tetangga terdekat.

Jika kita bicara tentang investasi kemanusiaan, maka wujud nyata dari investasi itu ialah pendidikan, yang berpuncak pada pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu di zaman modern ini, perguruan tinggi dengan kegiatan pendidikan dan penelitiannya merupakan pusat kreatifitas budaya bangsa dan barisan terdepan pengembangan budaya itu ke arah kemajuan-kemajuan baru. Sekalipun tidak secara keseluruhannya sama dengan perguruan-perguruan tinggi di negara lain, perguruan-perguruan tinggi kita telah menunjukkan kemampuan yang sepadan dalam memainkan peran mendorong kreatifitas budaya nasional dan memacu kemajuan bangsa. Fikiran-fikiran terbaik bangsa senantiasa timbul dari kalangan universitas, dan terobosan-terobosan kemajuan bangsa juga dipancarkan oleh kalangan universitas. Hal itu terbukti dengan nyata sekali oleh keberhasilan gerakan reformasi yang kini mulai kita rasakan manfaat dan maslahatnya. Gerakan reformasi itu sepenuhnya dimulai dari kalangan universitas, khususnya kalangan mahasiswa dengan jiwa kepeloporannya dan orientasi masa depannya.

Bertitik tolak dari keberhasilan gerakan reformasi itu, sudah sepatutnya kita semua, tanpa kecuali, ikut melibatkan diri dalam usaha bersama mencari jalan memperbaiki keadaan secara menyeluruh. Logika gerakan reformasi ialah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang berlaku, dan usaha mendapatkan bentuk keadaan yang lebih baik. Karena logika itu, maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari nol atau ketiadaan, betapapun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang diusulkan. Justu keberhasilan gerakan reformasi harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari tingkat kemajuan masyarakat dan dinamika perkembangannya. Maka pandangan yang hendak mempertahankan *status quo* dengan sendirinya akan tampil sebagai penghalang reformasi, sebab pandangan itu merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap logika perkembangan masyarakat yang terus maju dan meningkat.

Hakikat bangsa, negara dan masyarakat kita adalah hasil akumulasi pengalaman pembinaan dan pengembangan sejak masa-masa lalu yang jauh. Unsur-unsur asli format kenegaraan kita mula-mula diletakkan oleh para pendiri negara. Dari hasil usaha mereka

adalah kita sekarang mewarisi nilai-nilai asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai asasi itu, sebagaimana wajarnya, tercantum sebagai dasar-dasar negara dalam Mukadimah konstitusi kita, yang perangkat nilai itu lazim disebut Pancasila, dan konstitusi itu pun dikenal sebagai UUD 45. Itulah nilai-nilai pijakan kita bersama dalam usaha membina dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam suatu struktur politik yang kita pilih dan tetapkan dalam konstitusi, dengan kemungkinan pengembangan dan perbaikan terus-menerus.

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan ialah kesepakatan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka. Lepas dari kenyataan rumusan dan pengkalimatan formalnya sebagaimana terpaten dalam Mukadimah UUD, masing-masing nilai yang lima itu menciptakan suatu pandangan sosial-politik yang potensial sama dan selaras antara semua anggota masyarakat, mengikuti *common sense* masing-masing pribadi. Pandangan sosial-politik yang dihasilkan olehnya itu semuanya absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan atau menghalangi jiwa dan semangat tidak temu kebaikan bersama antara semua golongan, tanpa diskriminasi atau perbedaan satu dari yang lain secara tidak benar. Justru faham kemanusiaan universal menghendaki agar kita percaya kepada potensi kebaikan setiap pribadi. Faham kemanusiaan universal juga menghendaki agar kita percaya kepada kebaikan bersama yang dihasilkan oleh dinamika wacana umum dan bebas, dengan mempertaruhkannya kepada bimbingan hati nurani kemanusiaan universal itu. Karena itu fikiran-fikiran regimenter yang menghendaki penyeragaman pandangan masyarakat melalui kegiatan indoktrinasi artifisial adalah suatu gejala yang timbul hanya dari tiadanya kepercayaan kepada kebaikan kemanusiaan, dan kepada dinamika pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dalam suasana kebebasan yang wajar.

Dalam kenyataan sosiologis-historis, feodalisisme dan paternalisme adalah pangkal fikiran-fikiran regimenter, demikian juga pandangan yang negatif-pesimis kepada kemanusiaan. Karena itu penafsiran dan penjabaran nilai-nilai asas kenegaraan dan kemasyarakatan dalam Mukadimah UUD itu harus dibiarkan terbuka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Maka tidak dapat dibenarkan adanya penafsiran dan penjabaran dalam rumusan-rumusan yang

dibuat "sekali dan untuk selamanya" oleh perorangan atau kelompok dengan klaim kewenangan atau otoritas eksklusif. Otoritarianisme dalam fikiran akan dengan sendirinya berkorelasi kuat dengan otoritarianisme dalam kehidupan sosial-politik dan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pengalaman kenegaraan semua bangsa, termasuk bangsa kita, otoritarianisme itu terbukti merupakan sumber utama malapetaka nasional. Di samping itu, suatu nilai asasi yang dijabarkan secara otoriter "sekali dan untuk selamanya" akan menjilma menjadi sebuah ideologi tertutup. Dan ideologi tertutup, karena logika internalnya sendiri yang tertutup, akan dengan sendirinya terancam untuk menjadi ketinggalan zaman, tidak relevan dengan kenyataan kenyataan hidup yang secara dinamis terus berkembang secara terbuka.

Untuk prinsip bimbingan hidup (*guiding principle*), yang diperlukan oleh sebuah masyarakat bebas dan merdeka ialah kesetiaan kepada kesucian hati nurani. Dan karena suara hati nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani melibatkan perlindungan kepada kebebasan hati nurani (*freedom of conscience*). Dalam urutannya, kebebasan hati nurani mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama. Sebab dengan ajaran agama, melalui keimanan dan keteguhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati nurani dikukuhkan. Agama menanamkan keimanan dan keteguhan dalam dada yang merupakan milik pribadi orang bersangkutan yang paling mendalam dan berharga, karena bersangkutan dengan kesadarannya akan makna dan tujuan hidupnya. Keimanan dan keteguhan yang ada dalam dada itu merupakan wewenang suci Tuhan untuk mengetahui, mengukur dan menilainya, dan samasekali di luar wewenang sesama manusia. Semua pandangan prinsipil itu diisyaratkan dalam nilai pertama Mukadimah UUD, yang secara amat tepat oleh Bung Hatta disebut sebagai prinsip yang menyinari nilai-nilai yang lain dalam Mukadimah itu. Oleh karena itu pengusikan dan pengingkaran hak individu dan sosial manusia karena pandangan keagamaan (karena mengatakan, "Pangeran kami ialah Tuhan Yang Maha Esa"), adalah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan nurani. Sebaliknya, demi kebebasan nurani itu maka masyarakat dan negara berkewajiban menjaga keutuhan semua pranata keagamaan seperti biara, gereja, sinagog dan masjid, karena pranata atau institusi keaga-

maan adalah sarana dan tempat ditanamkannya keimanan kepada Tuhan. (Untuk dasar pandangan-pandangan ini, lihat. Q., 22:40).

Dengan latar belakang adanya memori kolektif tentang berbagai bentuk pertentangan sosial dan kultural masa lampau, kepekaan kepada pengembangan sikap dan pandangan kemanusiaan yang positif-optimis itu menjadi salah satu urgensi nasional. Masyarakat yang bahagia dengan kebebasan dan kemerdikaannya ialah masyarakat yang didukung oleh adanya jalinan hubungan cinta-kasih antara sesama manusia. dalam semangat cinta-kasih Ilahi yang suci (*rahmah, agape*) yang merupakan kelanjutan dari cinta kearifan kemanusiaan horizontal (*mawaddah, Philos*) dan cinta tingkat permulaan atas dasar pertimbangan-pertimbangan bentuk lahiriah (*mahabbah, eros*). Dalam semangat cinta-kasih Ilahi itu terlahir sikap penghargaan yang tulus dan pandangan penuh harapan kepada sesama manusia. Karena firrah dari Sang Khalik, setiap jiwa manusia adalah makhluk kesucian, kebaikan dan kebenaran, sebelum terbukti sebaliknya. Penyimpangan dari firrah harus dipandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat memusak firrah itu akibat kelemahan kemahluhkannya.

Karena faktor firrah itu, maka setiap orang harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan kemahluhkannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup rendah hati agar melihat kemungkinan dirinya salah, dan agar bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah, suatu bentuk interaksi sosial yang mengandung makna "saling memberi isyarat" tentang yang baik dan benar untuk semua.

Oleh karena itu prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan rusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah diri untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang

benar, yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan, adalah dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. Maka demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, semestinya menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus berinteraksi dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *a priori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat kepada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesama (*le desir d'être ensemble*) adalah natur manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul adalah juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justu keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat adalah prasarana penyediaan pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi dan mengambil secara positif. Maka keinginan berkumpul dapat dipandang sebagai bentuk pertama lembaga permusyawaratan.

Keinginan mewujudkan pandangan bersama itu dalam kerangka kegiatan tersusun atau terorganisasi menuntut adanya kebebasan asasi untuk berserikat. Masyarakat manusia terdiri dari pribadi-pribadi dengan minat dan perhatian yang beraneka ragam. Keaneekaragaman akan menjadi pangkal adanya interaksi sosial yang subur dan produktif, selama mendapat penyaluran yang wajar dan dibimbing oleh komitmen para pribadi anggota masyarakat kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sebaliknya, keseragaman artifisial melalui pengurangan dan mobilisasi masyarakat dalam sistem monolitik tidak saja memangkas potensi-potensi kreatif dalam masyarakat, tapi juga menghasilkan perasaan tertumbat yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekuatan destruktif.

Sekalipun pembentukan suatu serikat dapat dibuat untuk menampung aspirasi dan kegiatan di luar masalah politik seperti masalah keamanan, budaya, seni, ekonomi, dan seterusnya, serikat politik selamanya merupakan bentuk penting kebebasan asasi ketiga itu. Dengan serikat politik yang bebas, dan yang dibentuk karena panggilan tanggung jawab yang tulus dan murni kepada masyarakat dan negara, suatu unsur penting lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sehat akan terwujud, yaitu unsur pengawasan dan pengimbangan. Komitmen individual masing-masing orang kepada nilai-nilai luhur, yang merupakan prakondisi pertama masyarakat yang sehat, menuntut realisasi kongkretnya berupa komitmen dan perilaku sosial dalam hidup bersama. Pada urutannya, demi mencegah terjadinya penyimpangan, baik sadar atau tidak sadar, komitmen dan perilaku sosial itu harus terbuka kepada pengawasan oleh sesama anggota masyarakat. Disebabkan oleh kelemahan pribadi manusia yang membuatnya secara potensial menjadi tawanan dikte situasi, posisi dan lingkungannya, pengawasan sosial yang bebas adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga jangan sampai masyarakat luas menjadi korban. Semua pihak harus menerima dengan rela ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk membuat suatu pengawasan sosial menjadi benar-benar efektif. Bentuk ketentuan-ketentuan itu ialah aturan-aturan dan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Komitmen pribadi kepada nilai-nilai hidup yang luhur akan tidak bermakna apa-apa jika yang bersangkutan tidak mewujudkannya secara nyata dalam tindakan hidup pribadi sehari-hari. Oleh karena itu, komitmen pribadi itu kepada aturan-aturan dan hukum-hukum sebagai kenyataan pribadi itu kepada aturan-aturan dan hukum-hukum yang dinyatakan berlaku untuk setiap orang. Tidak ada suatu bagian dari aturan dan hukum yang terlalu kecil untuk ditaati, dan tidak ada seorangpun yang cukup besar untuk dibenarkan melanggar aturan dan hukum itu, atau untuk mengklaim dispensasi dari ketentuan yang berlaku. Semua anggota masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap yang teguh, konsekwen, berdisiplin, dan penuh kesetiaan dan ketabahan. Sekali suatu ketentuan aturan atau hukum diwar untuk dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak, sekalipun kecilnya ketentuan aturan yang dilanggar itu, biarpun,

misalnya, "sekecil" ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalan!

Tegaknya hukum dan peraturan sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan yang berjalan secara efektif itu, dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, terutama kekhususan bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tugas utama sistem pemerintahan, dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya, ialah kemampuan memelihara ketertiban, atau mengatur dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi ketentuan itu sendiri memerlukan parameter-parameter, berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Maka dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintahan secara keseluruhan berkewajiban memperhatikan agar parameter-parameter itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sendiri, khususnya kekuasaan eksekutif, memiliki fasilitas dan prasarana untuk melanggar ketentuan dengan dampak yang amat luas kepada kehidupan masyarakat ("*power tends to corrupt*"), maka sistem pengawasan dan pengimbangan harus terlebih dahulu, dan terutama, diciptakan antara ketiga unsur kekuasaan itu sendiri, yaitu unsur-unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pengawasan dan pengimbangan yang efektif akan terwujud jika masing-masing dari ketiga unsur kekuasaan itu independen satu dari yang lain, dan berkebebasan untuk melaksanakan pengawasan dan pengimbangan satu sama lain. Secara khusus, berkenaan dengan usaha penegakan hukum dan peraturan, sistem peradilan yang independen dan berfungsi secara penuh merupakan jaminan kelembagaan yang paling kuat bagi tegaknya hukum dan peraturan itu. Sebaliknya, sistem peradilan yang tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintahan eksekutif, juga pengaruh luar manapun, adalah salah satu jaminan paling pasti untuk runtuhnya ketentuan hukum dan peraturan. Dalam hubungan interaktif antara ketiga unsur kekuasaan itu, badan legislatif dituntut untuk benar-benar memenuhi fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Badan legislatif yang berfungsi penuh karena absah melalui pemilihan umum yang bebas, terbuka dan demokratis, merupakan faktor pengimbang dan

pengawas kepada keseluruhan proses dan struktur politik yang terjadi, sebagai realisasi kedaulatan rakyat.

Pada hakikatnya, kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Dan adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukadimah UUD 45 akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat itu. Hal ini terbukti dengan nyata dalam manapun akan akhirnya harus bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman kepada negara, dan dalam keadaan yang sulit itu akan tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota masyarakat luas yang benar-benar berkepentingan kepada keselamatan bangsa dan negara.

Karena itu kedaulatan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang ekonomi. Sesungguhnya, kedaulatan ekonomi inilah yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita bernegara. Sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut-punya dan rasa ikut-serta oleh semua. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, dan dibiarkannya praktek-praktek kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan metajela. Kesalahan dalam politik ekonomi dan pembangunan selama dua atau tiga dasawarsa terakhir ini, sekalipun tidak dapat diramalkan dengan pasti sebelumnya, telah berujung dengan hancurnya kedaulatan rakyat dan negara berhadapan dengan tekanan dunia luar. Sekalipun kerugian akibat kesalahan tersebut menimpa dunia luar yang bersangkutan itu sendiri juga, namun yang paling parah ialah kerugian yang menimpa rakyat, pendiri, pembentuk dan pemilik negara yang sebenarnya.

Pada titik ini ide reformasi yang dipelopori mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi membentuk lingkaran penuh dan sempurna. Reformasi itu berarti tolak dari komitmen masing-masing pribadi

kepada nilai kehidupan yang luhur, dan berakhir dengan komitmen kita semua kepada usaha mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memperhatikan segenap potensi nasional kita, baik dalam artian sumber daya manusia maupun dalam artian sumber daya alam. Kita harus menjadikan potensi-potensi nyata itu sebagai modal dan pangkal pembangunan ekonomi rakyat patriotik. Pembangunan ekonomi nasional harus diubah arah sedemikian rupa sehingga lebih berpijak kepada kenyataan-kenyataan nasional kita yang sebenarnya, dan tidak mengembara mengikuti gelombang fantasi, khayal dan iming-iming kemewahan dunia luar, yang ternyata telah berakhir dengan ancaman terhadap kedaulatan kita.

Ketangguhan ekonomi rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreatifitas setinggi-tingginya. Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan handalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. Dalam sistem ekonomi global—suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan—hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara sehat dalam dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak manapun juga. Dan dengan ketangguhan ekonomi nasional itu pula kita akan lebih terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional.

Oleh karena itu persoalan mutu sumber daya manusia menjadi taruhan utama. Dan disinilah letak penting dan strateginya *human investment* dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi itu adalah tugas kewajiban utama dunia pendidikan, dengan puncaknya dalam kegiatan pendidikan dan penelitian ilmiah perguruan tinggi. Ikut melakukan investasi itulah niat kita semua di sini, menuju terbinaanya peradaban baru Indonesia, dalam masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis.

Semoga Allah s.w.t. menganugerahkan petunjuk dan barakah-Nya kepada kita semua. Amin.

